



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Serang, Januari 2024
Pihak Pertama,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83
	SASARAN INTERNAL			
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4.1.02	Retribusi Daerah	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEPHUBUNGAN	111.516.129.104
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.981.549.824
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	64.588.526.280
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.720.000.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.226.053.000
	JUMLAH BELANJA	111.516.129.104

Pj. GUBERNUR BANTEN,**AL MUKTABAR****KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,****TRI NURTOPO, MT****NIP. 19660530 199003 1 003**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUSKA DESWianto**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

Pihak Pertama,

Drs. SUSKA DESWianto
NIP. 19661228 199203 1 002

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

DPA TA-2024

[illegible]

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.066.537.224
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.013.672.224
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.950.000
2.15.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88.325.000
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000
2.15.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34.971.000
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34.944.000
2.15.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.525.000
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.500.000
2.15.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.500.000
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.000.000
2.15.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	53.000.000
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.931.200
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.500.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.431.200
2.15.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.516.000
2.15.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.516.000
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.605.470.400
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.470.400
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.005.000.000
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.795.000
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.795.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

Drs. SUSKA DESWIANTO
NIP. 19691228 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERRY JUNANTA, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

VERRY JUNANTA, SE, M.SI
NIP. 19750616 200112 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

DPA TA-2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	Persen	50
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	450.000.000
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000
2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.672.248.800
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.672.248.800

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

VERRY JUNANTA, SE, M.SI
NIP. 19750616 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	Persen	50

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	30.588.118.080
2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	7.447.567.600
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18.246.486.050
2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	346.212.800
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.547.851.630
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	180.000.000
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	180.000.000

Pihak Kedua,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Pertama,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. AMIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

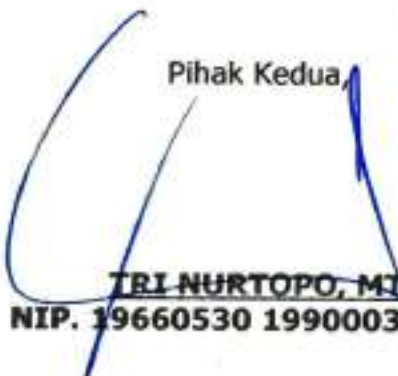
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,


MOH. AMIN, S.Sos
NIP. 19670205 198801 1 002

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

DPA TA-2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Persen	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persen	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.270.000.000
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1.270.000.000
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350.000.000
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350.000.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	2.226.053.000
2.15.05.1.06.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	2.226.053.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003


MOH. AMIN, S.Sos
NIP. 19670205 198801 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M
NIP. 19690408 199003 1 001

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	Persen	100
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	Persen	20

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	27.905.619.400
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.242.669.000
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.800.260.000
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000
2.15.02.1.05.07	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	24.812.690.400
2.15.02.1.07	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.392.540.000
2.15.02.1.07.06	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	30.000.000
2.15.02.1.07.11	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1.212.540.000
2.15.02.1.07.12	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	50.000.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.02.1.07.14	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Pada Terminal Tipe B	100.000.000
2.15.02.1.07	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.392.540.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M
NIP. 19690408 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

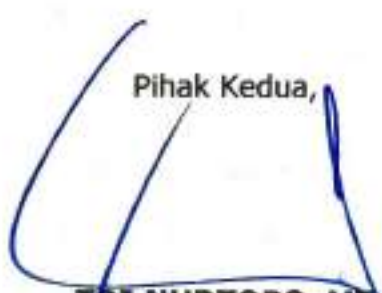
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

Pihak Pertama,


BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPTD)	Persen	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan	Persen	100

BELANJA

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.695.000
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.695.000
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.105.000
2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.105.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,


BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. TUBAGUS AAN ANDRIAWAN, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SUSKA DESWianto**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Drs. SUSKA DESWianto
NIP. 19691228 199203 1 002


H. TUBAGUS AAN ANDRIAWAN, SE, M.Si
NIP. 19770703 200902 1 001

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	76
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.066.537.224
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.013.672.224
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.950.000
2.15.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88.325.000
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000
2.15.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34.971.000
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34.944.000
2.15.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.525.000
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.500.000
2.15.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.500.000
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.000.000
2.15.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	53.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.931.200
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.500.000
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.431.200
2.15.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.516.000
2.15.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.516.000
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.605.470.400
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.470.400
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.005.000.000
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.795.000
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.795.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



Drs. SUSKA DESWianto
NIP. 19691228 199203 1 002

Pihak Pertama,



H. TUBAGUS AAN ANDRIAWAN, SE, M.Si
NIP. 19770703 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DANI HENDRA**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PRASARANA JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

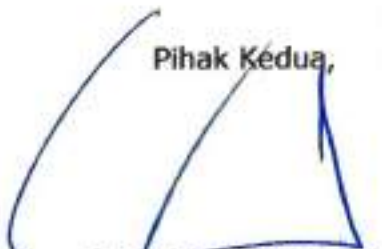
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,


Drs. DANI HENDRA
NIP. 19720602 199202 1 001

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit	28
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	14
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	7.447.567.600
2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	346.212.800
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	180.000.000
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	180.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



TRI NURTOPO MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,



Drs. DANI HENDRA
NIP. 19720602 199202 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMATULLAH, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,

RAHMATULLAH, S.Kom
NIP. 19740903 200112 1 006

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	1060
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	110

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	18.246.486.050
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.547.851.630

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 1990003 1 003

Pihak Pertama,



RAHMATULLAH, S.Kom
NIP. 19740903 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALDI MOHAMAD PRINALDI, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VERRY JUNANTA, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

VERRY JUNANTA, SE, M.SI
NIP. 19750616 200112 1 003

Pihak Pertama,

ALDI MOHAMAD PRINALDI, SE, MM
NIP. 19760412 200112 1 002

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	2

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.672.248.800
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.672.248.800

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



VERRY JUNANTA, SE, M.SI
NIP. 19750616 200112 1 003

Pihak Pertama,



ALDI MOHAMAD PRINALDI, SE, MM
NIP. 19760412 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERIK HERLAMBAH, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VERRY JUNANTA, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

VERRY JUNANTA, SE, M.SI
NIP. 19750616 200112 1 003

Pihak Pertama,

ERIK HERLAMBAH, ST, MM
NIP. 19700827 200112 1 002

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	450.000.000
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000
2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



VERRY JUNANTA, SE, M.SI
NIP. 19750616 200112 1 003

Pihak Pertama,



ERIK HERLAMBAH, ST, MM
NIP. 19700827 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USEP HERDIANA, S.Sos, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PERHUBUNGAN UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. AMIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

MOH. AMIN, S.Sos
NIP. 19670205 198801 1 002

Pihak Pertama,

USEP HERDIANA, S.Sos, MM
NIP. 19710325 199312 1 004

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	6

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	2.226.053.000
2.15.05.1.06.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	2.226.053.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



MOH. AMIN, S.Sos
NIP. 19670205 198801 1 002

Pihak Pertama,



USEP HERDIANA, S.Sos, MM
NIP. 19710325 199312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMAN WAHYU, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KEPELABUHAN DAN ASDP**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. AMIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

MOH. AMIN, S.Sos
NIP. 19670205 198801 1 002

Pihak Pertama,

IMAN WAHYU, SE, M.SI
NIP. 19750626 200112 1 003

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	3
2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	2

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.270.000.000
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1.270.000.000
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350.000.000
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



MOH. AMIN, S.Sos
NIP. 19670205 198801 1 002

Pihak Pertama,



IMAN WAHYU, SE, M.SI
NIP. 19790626 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE NURYASIN, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

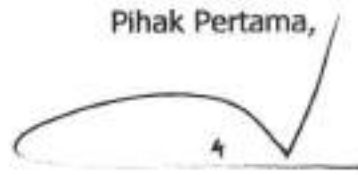
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,


ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M
NIP. 19690408 199003 1 001

Pihak Pertama,


ADE NURYASIN, SE, M.SI
NIP. 19780105 200112 1 001

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
DPA TA-2024

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	7
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	3
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1
4	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	130

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	27.905.619.400
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.242.669.000
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.800.260.000
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.02.1.05.07	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	24.812.690.400

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M
NIP. 19690408 199003 1 001

Pihak Pertama,



ADE NURYASIN, SE, M.SI
NIP. 19780105 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHOLID, S.Ag., M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI BINA KESELAMATAN LALU LINTAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

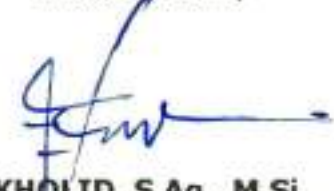
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,


ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M
NIP. 19690408 199003 1 001

Pihak Pertama,


KHOLID, S.Ag., M.Si
NIP. 19710209 200112 1 005

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen	1
2	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	4
3	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	20
4	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	2

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.07	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.392.540.000
2.15.02.1.07.06	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	30.000.000
2.15.02.1.07.11	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1.212.540.000
2.15.02.1.07.12	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	50.000.000
2.15.02.1.07.14	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Pada Terminal Tipe B	100.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M
NIP. 19690408 199003 1 001

Pihak Pertama,



KHOIRID, S.Ag., M.Si
NIP. 19710209 200112 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT GUNAWAN, S.IP, S.Mn, MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak/Kedua,

BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,

RAHMAT GUNAWAN, S.IP, S.Mn, MM
NIP. 19730706 200112 1 002

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.695.000
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.695.000
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.105.000
2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.105.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,



RAHMAT GUNAWAN, S.IP, S.Mn, MM
NIP. 19730706 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUFRIYANTO ASSAGAF, SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LAUT DAN UDARA UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,

SUFRIYANTO ASSAGAF, SE
NIP. 19690910 199203 1 007

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	2

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,



BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,



SUFRIYANTO ASSAGAF, SE
NIP. 19690910 199203 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDE GUNADI, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA PERHUBUNGAN DARAT DAN
PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA
PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM
NIP. 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,

DEDE GUNADI, S.IP
NIP. 19670911 198903 1 011

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	100

BELANJA

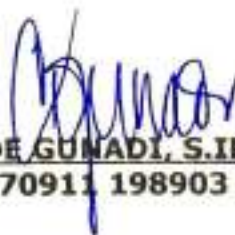
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400.000.000

Serang, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**
NIP. 19850623 200912 1 002

Pihak Pertama,

**DEDE GUNADI, S.IP**
NIP. 19670911 198903 1 011